

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Kebijakan Analisis dan Pelayanan Publik Volume 2 Nomor 1*, 47-64.
- Akbar, M. F., & Mohi, W. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Amin, Safrudin.(2014). Memperkenalkan Evaluasi Program Secara Kualitatif. *Jurnal ETNOHISTORI Vol 1 No 1*.
- Ardiyansyah, A., & Kristyaningrum, D. H. (2019). Evaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kabupaten Brebes menggunakan model CIPP. *Jurnal Dialektika PGSD*, 186-195.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asiyah, S. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Pasaman. *Journal Of Public Sector Innovation*, Vol 2.
- Deswary, D. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan No. 12 Tahun 2012 Tentang Tuntutan Pengelolaan Kurikulum. *Jurnal Manajemen Pendidikan Volume 8 Nomor 1*.
- Hajarah, M. (2018). Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program. *Foundasia*, 27-42.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik : Proses, analisis, dan partisipasi*. Ghalia Indonesia.
- Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasbullah, S. A. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 9 No 2.
- Hoerudin, C. W. (2019). Evaluation Of New Student Admission Policy Based On Zonation System In Bandung City. *JISPO Vol 9 No 2* , 351-361.
- Kemdikbud, P. (2018). *Sistem Zonasi*. Jakarta: Kemdikbud.

- Lestari, H., & Rosdiana, W. (2018). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017. *Publika Vol 6 No 5*, 1-7.
- Moloeng, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pangaribuan, E., & Hariyati, N. (2019 Vol 7 No 1). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB jenjang SMP di Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 1-12.
- Parson, W. (2017). *Policy Public :Pengantar Teori dan praktik analisis kebijakan*. Jakarta: KEncana.
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 78-92.
- Purwanti, D., Irawati, I., & Adiwisastro, J. (2018). Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Peserta didik Rawan Melanjutkan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5 No 4*, 1-7.
- Rawita, & Sutisno, I. (2013). *Kebijakan pendidikan Teori Implementasi dan Monev*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Rawita, I. S. (2013). *Kebijakan Pendidikan Teori Impementasi dan Monev*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Rusdiana, A. (2015). *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang responsif*. Bandung: CV. Adoya Mitra Sejahtera.
- Safarah, A., & Wibowo, U. (2018). Program Zonasi di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualtas Pendidikan di Indonesia. *Lentera Pendidikan Vol 21 No 2*, 206-213.
- Schwartz, e. (2014). Inclusionary Zoning Can Bring Poor Families Closer to Good School. *Policy Brief "How Housing Matters" pada macfound.org/housingmatters*.
- Sufflebeam, Madaus, G., & Kellaghar, T. e. (2002). *Evaluation Models; Viewpoint on Educational and Human Services Evaluation*. New York: Kluwer Academic Publisher.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2013). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Yogya: Penerbit Ombak.

Sukemi, Adriono, & Andries, D. W. (2018). *Kebijakan Zonasi Percepat Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .

Ulfah, A. d. (2016). Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online. *Jurnal Pasca UM*, 4.

Wahab, S. (2016). *Analisa Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Warsita, B. (2015). Evaluasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran. *Kwangsan, Vol 3 No 1 Edisi Juni*, 27-44.

Wells, A. S. (2015). Diverse Housing, Diverse Schooling: How Policy Can Stabilize Racial Demographic Change in Cities and Suburbs. *National Education Policy Center University of Colorado Boulder*.

Widayanti, D., & Rosdiana, W. (2019). EVALUASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMAN 22 SURABAYA TAHUN 2018.

Winarno, B. (2014). *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Press.

Media Online

<http://jabar.tribunnews.com/2019/06/29/ombudsman-jabar-terima-86-laporan-ppdb-paling-banyak-masalah-zonasi> diakses pada 5 Oktober 2019.

<http://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/27/07/2019/evaluasi-mendikbud-dan-ombudsman> diakses pada 28 Oktober 2019.

<http://megapolitan.kompas.com/> diakses pada 28 Oktober 2019.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/06/21/jokowi-sistem-zonasi-ppdb-banyak-masalah-yang-perlu-dievaluasi> diakses pada 2 November 2019.

<http://nasional.republica.co.id/berita/pug9tl459/ombudsman-periksa-5-sma-di-bekasi-terkait-ppdb-2019> diakses pada 2 November 2019.

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/ini-alasan-zonasi-diterapkan-dalam-penerimaan-peserta-didik-baru> diakses pada 5 Januari 2020.

<https://bandung.kompas.com/read/2018/07/11/17362241/sistem-zonasi-ppdb-dinilai-hambat-pendidikan-anak> diakses pada 18 Januari 2020

<https://www.kabar-banten.com/page/2/?s=zonasi> diakses pada 20 Januari 2020

Peraturan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 Tentang penerimaan peserta didik baru taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.

